

**KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 48****TAHUN 2009****PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 48 TAHUN 2009****TENTANG****ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) PADA DINAS PENDIDIKAN****BUPATI CIANJUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);
10. Peraturan Bupati Cianjur nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri selanjutnya disebut SMKN adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
8. Kepala SMKN adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi SMKN.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

SMKN adalah unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala SMKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

SMKN mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas di bidang penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, SMKN mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja SMKN sesuai dengan kebijakan teknis operasional dinas di bidang penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas di bidang penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan;
- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan program tahunan dinas di bidang penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan;
- d. penyiapan bahan koordinasi perumusan program lima tahunan dinas dibidang penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- f. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
- g. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan kerumah tanggaan SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur-unsur organisasi SMKN, adalah sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan adalah Kepala SMKN.
- b. Unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Tata Usaha;
- c. Unsur pelaksana adalah Kepala Unit dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi SMKN, terdiri dari :

- a. Kepala SMKN
- b. Kepala Tata Usaha
- c. Unit Fungsional Bidang Kurikulum
- d. Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler;
- e. Unit Perpustakaan;
- f. Unit Laboratorium dan Praktek;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Llampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK KEPALA

Pasal 7

Kepala SMKN mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan, serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN SMKN

Bagian Pertama

Tata Usaha

Pasal 8

(1) Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SMKN dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, kesiswaan, urusan umum dan kerumah tanggaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha sesuai dengan rencana kerja SMKN;
 - b. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, penyusunan, penetapan rencana kerja tahunan dan lima tahunan SMKN sesuai dengan program kerja dinas;
 - c. penyiapan bahan koordinasi perumusan program kerja tahunan dan lima tahunan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, penyusunan, dan penetapan kebijakan SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan administrasi kesiswaan serta hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pengelolaan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana kerja serta ketentraman, keteriban, dan kebersihan lingkungan SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelayanan data dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan bagi satuan unit organisasi di lingkungan SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tata Usaha.
- (3) Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Unit Fungsional Bidang Kurikulum

Pasal 9

- (1) Unit Fungsional Bidang Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SMKN dalam menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum serta menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Fungsional Bidang Kurikulum, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Unit Fungsional Bidang Kurikulum;

- b. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMKN di bidang penyusunan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengkajian dan pengembangan kurikulum SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan dan penetapan jadwal mata pelajaran;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan dan penetapan tugas pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Unit Fungsional Bidang Kurikulum kepada Kepala SMKN.
- (3) Unit Fungsional Bidang Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Unit Bidang Kurikulum atau dapat disebut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMKN.

Bagian Ketiga

Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler

Pasal 10

- (1) Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SMKN dalam melaksanakan bimbingan konseling dan menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler siswa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Unit Fungsional Bidang Kesiswaan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMKN di bidang pengembangan dan pembinaan kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. pelaksanaan Bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa dalam akademik maupun non akademik;
 - f. pengumpulan, pengoajian dan pendokumentasian data perkembangan pribadi siswa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler kepada Kepala SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler dipimpin oleh Kepala Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler atau dapat disebut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMKN.

Bagian Keempat

Unit Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Unit Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SMKN dalam melaksanakan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Perpustakaan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Unit Perpustakaan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMKN di bidang pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan perpustakaan;
 - d. pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelayanan referensi dan kepastakaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMKN.

Bagian Kelima

Unit Laboratorium dan Praktek

Pasal 12

- (1) Unit Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SMKN dalam melaksanakan pengelolaan laboratorium dan praktek keahlian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Laboratorium, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Unit Laboratorium dan praktek;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMKN di bidang pengelolaan dan pengembangan laboratorium dan praktek keahlian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan laboratorium dan praktek keahlian;
 - d. pengelolaan laboratorium dan praktek keahlian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan perasarana laboratorium dan praktek keahlian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMKN sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Laboratorium dan Praktek sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Laboratorium dan Praktek dipimpin oleh seorang Kepala Unit Laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMKN.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SMKN sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Pertama Umum
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala SMKN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup SMKN maupun dengan satuan unit organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SMKN wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SMKN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SMKN wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi Dinas serta menjabarkannya dalam program operasional dan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Kepala SMKN menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sekretaris.
- (7) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tembusannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 15

- (1) Kepala Tata Usaha mewakili Kepala SMKN dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala SMKN berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Kepala Unit Fungsional Bidang Kurikulum (Wakil Kepala Bidang Kurikulum) mewakili Kepala SMKN dalam hal Kepala SMKN berhalangan melaksanakan tugas bidang Edukatif.
- (3) Dalam hal Kepala Unit Fungsional yang dimaksud pada ayat (2) berhalangan Kepala Sekolah dapat menunjuk Kepala Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ektrakurikuler.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan SMKN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SMKN serta para pemegang jabatan lainnya dalam lingkungan SMKN dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkungan unit kerja.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

- (1) Kepala SMKN adalah pejabat fungsional guru yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala SMKN oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Tata Usaha adalah pejabat eselon IV b;
- (3) Kepala Unit Fungsional adalah pejabat fungsional guru yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit Fungsional (Wakil Kepala Sekolah) oleh Kepala SMKN.
- (4) Kepala Unit Perpustakaan dan Kepala Unit Laboratorium adalah pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit Perpustakaan dan Kepala unit Laboratorium oleh Kepala SMKN.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 48 TAHUN 2009.

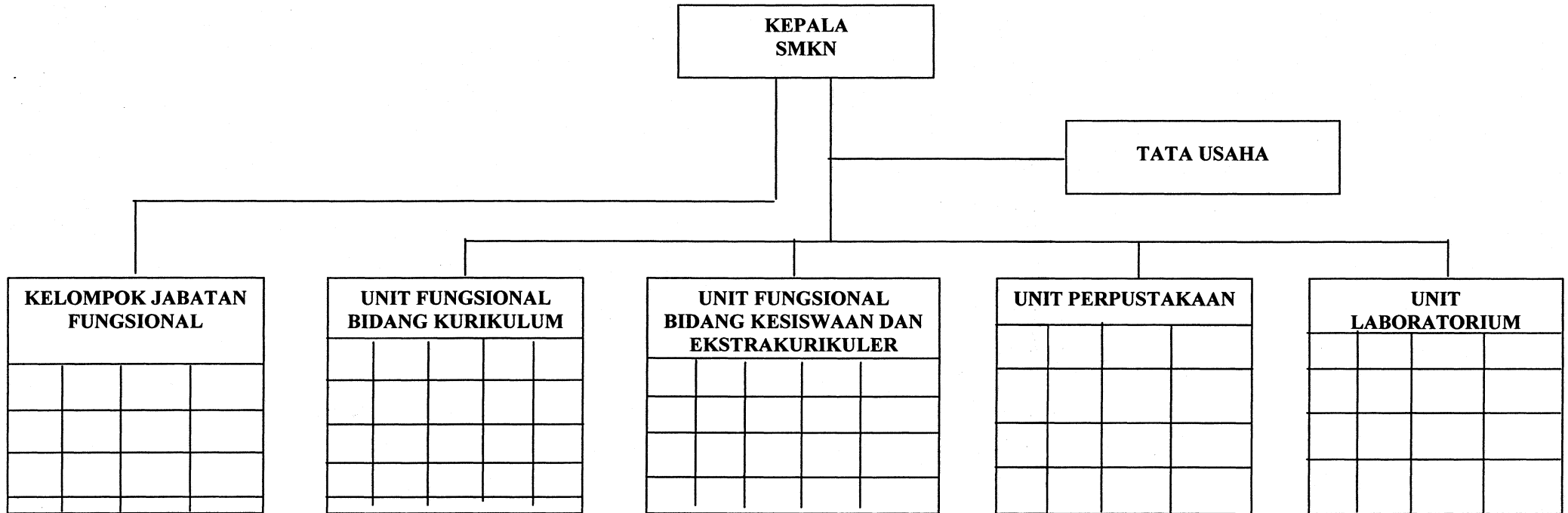
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 48 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) PADA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH